

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA

Arief Rahman¹, Ella Dewi Latifah², Sayed Fachrurrazi³

¹Prodi Akuakultur Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh, ²Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Falah Cicalengka, ³Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh

Jl. Medan Banda Aceh Cot Tgk Nie-Reulet, Aceh Utara, 141 Indonesia
email: arief.rahman@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan akan pentingna teknologi informasi dalam mendorong masyarakat dalam partisipasi politik. Penelitian ini dilakukan dengan metode literatur karena peneliti ingin mengetahui tentang analisis peran teknologi informasi dalam rangka menciptakan partisipasi politik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Teknologi informasi memiliki berbagai peran dalam kehidupan masyarakat, salah satunya untuk dapat mewujudkan partisipasi politik di masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang tersebar di media cetak dan elektronik khususnya internet yang menjadi sumber berita utama di masyarakat akhir-akhir ini. Teknologi informasi membuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah semakin erat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Kebebasan teknologi informasi saat ini membuat sebagian orang tidak bisa memilah berita yang benar dan berita yang salah. Karena beberapa pihak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh teknologi saat ini. Sehingga masyarakat harus menyaring setiap berita yang didapatkan untuk dapat menyaring.

Kata kunci: teknologi informasi, partisipasi politik, warga negara.

Abstract

This article was conducted aimed at knowing the role of information technology to drive political participation. This research was conducted with a literature method because researchers wanted to know about the analysis of the role of information technology in order to create a political participation. As for the data collection techniques used were literature review. Information technology has various roles in people's lives, one of

Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara

which is to be able to realize political participation in the community through various news spread in print and electronic media, especially the internet, which has become the main news source in the community lately. Information technology makes the relationship between the community and the government closer, so that people can get information quickly and accurately. Today's freedom of information technology makes some people unable to sort out the right news and the wrong news. Because some parties abuse the freedoms given by today's technology. So public have to filter every news that their get from internet.

Keywords: information technology, political participation, citizens

1. PENDAHULUAN

Perkembangan TI sangat penting terutama di media sosial. Tingkat pengguna internet dari 2013 hingga 2018 meningkat drastis. Dengan perkembangan tersebut masyarakat tidak pernah terlepas dengan teknologi informasi khususnya generasi milenial dan gen Z. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menjadikannya sebagai sumber informasi utama. Dalam sebuah system diperlukan adanya sebuah rancangan dan penerapan dalam sebuah penerapan mode Sistem Informasi untuk dapat dikembangkan (Pratama, et.all., 2021).

Namun saat ini dalam hitungan detik saja, setiap lapisan masyarakat telah dapat mengakses berbagai informasi baik informasi nasional maupun informasi internasional. Selanjutnya adanya Upaya dapat meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam pemilihan suatu partai politik (Ilmy, et.all., 2021). Ini merupakan bukti bahwa perkembangan teknologi di Indonesia sudah sangat pesat dan tersebar merata disetiap kalangan masyarakat, sehingga media elektronik menjadi informasi utama bagi masyarakat. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan gagasan di media elektronik mampu mempengaruhi pemikiran masyarakat. Setiap media memiliki daya tariknya masing - masing untuk mempengaruhi konsep pikir terhadap pemerintah.

Namun disaat masyarakat tidak mampu memfilter informasi yang disampaikan melalui media, maka informasi yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya, tetapi Saat mereka dapat menyaring informasi yang ada maka itu berdampak baik dan membuat paham terhadap kondisi yang sebenarnya. Pentingnya pemanfaatan TI dalam komunikasi Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara

partisipasi politik dalam dunia informasi (Yusri, et., all, 2021). Masyarakat yang awalnya tidak peduli terhadap pemerintahan, kini menjadi tertarik dan kembali ikut serta peduli dengan perkembangan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan jiwa demokratisnya kembali.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang peneliti peranan teknologi informasi untuk mewujudkan warga yang demokratis. Dengan demikian teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pun sebagai alat pendukung dalam proses demokrasi. Sehingga adanya peningkatan informasi untuk pentingnya teknologi tersebut (Situmeang, 2021). Syarat untuk itu terjadi terutama adalah keinginan yang tulus dari anggota masyarakat untuk mengambil tindakan demokratis, memiliki akses ke teknologi dan keterampilan untuk menggunakannya.

Sistem TI yang mengandung fungsi dukungan komunikasi, jaringan manusia, efisiensi, keputusan politik, keputusan otoritas, pelayanan masyarakat, dan wawasan public memiliki potensi besar untuk mendukung proses demokrasi di masyarakat manapun, terlepas dari arah politik pemerintahnya. (Lidén, Gunnar & Avdic, Anders, 2003).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Teknologi Informasi

Dalam perkembangannya, ilmu pun menjadi aspek utama perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tidak akan terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan dari sains lahirlah teknologi yang dalam bahasa Yunani, *techne* berarti 'keahlian' dan *logia* yang berarti 'pengetahuan'. Selanjutnya adanya teknologi untuk monitoring mendukung dalam perkembangan teknologi informasi kedepannya da nada teknologi dalam pembelajaran teknologi dengan *blended learning* (Ula, et.all., 2021) (Fitri, et al., 2021).

Teknologi mengacu pada penggunaan mesin dan peralatan yang membuat kehidupan kita sehari-hari lebih sederhana dan teratur. Teknologi merupakan buah pemanfaatan ilmu pengetahuan. Teknologi memanfaatkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang ada untuk menyelesaikan masalah dan pentingnya analisis dalam sebuah evaluasi system diperlukan untuk melihat nilai partisipasi dalam pengambilan

keputusan (Fitri, et.,all., 2022) dan pentingnya sebuah software dan hardware untuk mendukung aktivitas teknologi tersebut (Rusman dkk, 2012:78).

Kamus Merriam-Webster merupakan sebuah informasi dalam penerapan teknologi untuk kemampuan yang strategis dalam penerapan peningkatan partisipasi dan selanjutnya menurut Franklin (1989) memberikan definisi teknologi yakni *practice, the way we do things around here* yang mempunyai arti sebuah lapangan teknologi dalam melihat teknologi yang dibutuhkan oleh konsumen dan pengembangan system informasi(Ikram, et.,all.,2021).

Peran teknologi informasi dalam penggunaan di tempat lain dan perkembangan informasi di dunia sekarang ini telah menyebar terutama pada TI pada pendidikan (Budiman, 2017). TI juga dapat digunakan pada media pembelajaran (Anshori, 2018).

Secara teori, gagasan tentang teknologi menyiratkan suatu gaya berpikir, termasuk jenis keahlian untuk dapat membantu pekerjaan human di bidang TI (Ravianto, 1985). Teknologi juga dapat dilihat sebagai sarana untuk memastikan keberadaan manusia dan meningkatkan kesejahteraan.

Pengetahuan tertulis (direkam) secara tertulis (tercetak atau numerik), lisan atau bentuk audiovisual. Informasi memiliki unsur makna. Ini adalah makna yang ditransmisikan kepada makhluk yang sadar melalui pesan yang tertulis di media ruang-waktu seperti barang cetakan, sinyal listrik, gelombang suara, dll. (Le Coadic, 1996).

Dengan demikian teknologi informasi dapat diartikan sebagai semua perangkat yang memiliki kapasitas untuk memproses data dan atau informasi, baik secara sistemik maupun sporadis, baik diaplikasikan pada produk maupun diaplikasikan pada proses. Dalam kamus yourdictionary.com dijelaskan bahwa teknologi informasi adalah 1) cabang teknologi yang berhubungan dengan praktis, misalnya bisnis dan industri, penggunaan komputer dan sistem telekomunikasi. 2)Teknologi yang terlibat dengan transmisi dan penyimpanan informasi, terutama pengembangan, instalasi, implementasi, dan manajemen sistem komputer dalam perusahaan, universitas, dan organisasi lainnya. 3) Teknologi informasi didefinisikan sebagai istilah luas yang mencakup

pengembangan, pemasangan, dan penggunaan segala sesuatu yang berhubungan dengan komputasi dan telekomunikasi.

2.2 Demokrasi dan Partisipasi Politik

Studi tentang partisipasi politik dimulai dengan dugaan bahwa partisipasi politik dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. "Setiap buku tentang partisipasi politik juga merupakan buku tentang demokrasi" (Parry et al, 1992:3). Partisipasi warga umumnya disepakati sebagai unsur penting dari demokrasi yang sehat (Bullock, 2014). Dalam demokrasi di atas terlihat bahwa "rakyat" menjadi titik sentral pemerintahan demokratis yang karenanya menurut Pabottinggi (2002) harus disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma "otocentricity" atau otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai "...seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Alhasil, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan" (USIS, 1995).

Sementara itu CICODE (1999) mengadopsi konsep demokrasi sebagai kerangka pemikiran penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat telah diterima secara universal sebagai cita-cita, norma, sistem sosial tertinggi, serta pengetahuan, sikap, dan perilaku individu yang perlu dibuktikan secara kontekstual, dihargai, dan dikembangkan.

Mencermati beberapa pengertian di atas terlihat bahwa demokrasi tidak hanya didefinisikan dalam konteks demokrasi politik atau sekedar bentuk pemerintahan. Demokrasi dalam pengertian yang komprehensif merupakan sebuah bentuk pemerintahan, bentuk negara, pola sistem sosial, rancangan tatanan ekonomi, cara hidup dan budaya.

Demokrasi yang hidup dicirikan oleh perluasan berkelanjutan dari bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia (Van Deth, 2016). Partisipasi politik dapat secara longgar didefinisikan sebagai kegiatan warga yang mempengaruhi politik. Karakter unik demokrasi adalah menekankan peran warga negara biasa dalam urusan politik. Partisipasi politik relevan untuk semua sistem politik, tetapi ini adalah fitur yang tak terpisahkan dari demokrasi.

Terdapat beberapa ciri utama partisipasi politik (Van Deth, 2016). partisipasi mengacu pada kegiatan orang-orang dalam peran mereka sebagai nonprofesional atau amatir dan bukan, katakanlah, sebagai politisi, pegawai negeri, atau pelobi. Dengan demikian, setiap aktivitas sukarela dan nonprofesional yang menyangkut pemerintahan, politik, atau negara adalah contoh partisipasi politik.

Partisipasi politik mengacu pada kegiatan sukarela yang dilakukan oleh publik massa untuk mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun dengan mempengaruhi pemilihan orang yang membuat kebijakan. Contoh kegiatan ini termasuk memberikan suara dalam pemilihan, membantu kampanye politik, menyumbangkan uang kepada kandidat atau tujuan, menghubungi pejabat, mengajukan petisi, memprotes, dan bekerja dengan orang lain dalam suatu masalah. Partisipasi warga merupakan landasan dan prasyarat bagi demokrasi (Uhlener, 2001).

Warga dapat berpartisipasi secara politik dalam beberapa cara yang berbeda-dengan memilih pejabat melalui pemilihan atau dengan mempengaruhi kebijakan secara langsung melalui protes, lobi atau demonstrasi.

Denominator umum untuk partisipasi dalam demokrasi ideal mana pun akan menjadi fokus pada suara dan kesetaraan. Suara setiap warga negara harus didengar dengan jelas serta didengar dengan sama jelas. Untuk memenuhi cita-cita demokrasi tentang pengaruh warga negara yang setara, partisipasi harus setara. Namun, pada kenyataannya, cita-cita ini tidak pernah sepenuhnya terwujud dalam demokrasi manapun. Jelas bahwa suara beberapa orang terdengar sangat keras dan jelas, sementara yang lain tidak terdengar sama sekali.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode tinjauan literatur. Menurut Tranfield et al (2003) tinjauan pustaka adalah cara terbaik untuk mensintesis temuan penelitian untuk menunjukkan bukti pada tingkat meta dan untuk mengungkap area di mana lebih banyak penelitian diperlukan, yang merupakan komponen penting untuk menciptakan kerangka teoretis dan membangun model konseptual. Namun, cara tradisional untuk

mendeskripsikan dan menggambarkan karya sastra seringkali kurang teliti dan tidak dilakukan secara sistematis.

Untuk itu penulis melakukan langkah-langkah tinjauan literatur berikut yaitu menemukan literatur yang terkait dengan topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan yang dapat diatasi, menganalisis temuan yang relevan, menentukan bagaimana artikel tersebut relevan dengan penelitian dan temuan utamanya dan terakhir sintesis yakni temuan kunci dan relevansinya topik penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Secara faktual teknologi informasi berperan penting dalam proses perubahan politik. Terdapat keyakinan bahwa teknologi informasi dapat membuka jalan bagi demokrasi langsung sementara itu serta menghilangkan hambatan komunikasi dalam proses demokratisasi (Toffler, Toffler et al. 1994), (Rheingold 1994), (Dyson 1998). Partisipasi warga dalam kegiatan demokrasi melalui sistem berbasis TIK disebut e-partisipasi. Saat ini, itu adalah mungkin untuk menggunakan fasilitas digital untuk membuka jalan bagi partisipasi demokratis. Untuk mengukur partisipasi perlu diketahui berbagai jenis kegiatan yang dapat dilakukan secara online. Gibson (2005) menyebutkan beberapa contoh e-partisipasi seperti daftar pengiriman kartu pos elektronik atau lelucon politik, mengunduh perangkat lunak kampanye, meneruskan secara online petisi atau mendaftar untuk buletin e-news, dan lain-lain. E-partisipasi melibatkan perluasan dan transformasi partisipasi dalam masyarakat demokratis dan proses konsultatif yang dimediasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Demokrasi dan proses politik formal pada dasarnya bergantung pada komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang terinformasi tentang isu-isu publik di antara warga negara, politisi, pejabat, dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin terpengaruh oleh keputusan kolektifnya (Sanford, C., & Rose, J, 2007).

E-partisipasi bertujuan untuk mencapai banyak tujuan seperti: menggunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung kewarganegaraan aktif, memungkinkan partisipasi yang lebih luas untuk mencapai khalayak yang lebih luas, dan memungkinkan kontribusi warga

yang lebih terinformasi melalui penyediaan yang dapat diakses dan informasi yang dapat dipahami oleh target audiens (Al-Dalou, R., & Abu-Shanab, E, 2013). Dalam hal ini banyak penelitian juga telah dilakukan untuk membedakan apakah bentuk partisipasi digital baru ini (e-participation) benar-benar perluasan partisipasi konvensional atau jika mampu menghasilkan bentuk-bentuk partisipasi baru. Cantijoch dan Gibson [6] menyimpulkan bahwa partisipasi online tidak dapat dipahami sebagai suatu model yang baru dan independen tetapi menghubungkan dan memadukan dengan bentuk yang ada.

Di sisi lain, Saebo (2008) memperkenalkan dua bentuk partisipasi: bentuk pertama adalah partisipasi yang didorong oleh pemerintah, di mana partisipasi adalah tanggung jawab pemerintah dan juga terutama ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah partisipasi berbasis warga yang berarti bahwa adaptasi dan pengembangan teknologi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi gerakan sosial yang dibuat oleh warga dan diaktifkan oleh jaringan.

Selanjutnya studi yang dilakukann Nam (2011) tentang kesetaraan dalam partisipasi politik dan efek ganda dari internet tentang partisipasi politik menunjukkan bahwa internet, sampai batas tertentu, dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas partisipasi politik. Hal ini menunjukkan sifat teknologi internet mungkin memiliki potensi demokratis potensi untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas partisipatif. Kedua, internet tidak hanya memperkuat pola partisipasi politik offline yang ada, tetapi juga memobilisasi pola baru untuk partisipasi politik online. Ketiga, prediktor kuat untuk aktivitas politik online berbeda dari untuk aktivitas politik offline. penggunaan internet yang sering berkontribusi pada mobilisasi partisipasi baru oleh orang-orang tidak aktif offline, serta memperkuat partisipasi berkelanjutan oleh orang-orang aktif offline. Peserta tidak aktif offline akan secara aktif melibatkan diri dalam aktivitas politik online sebanding dengan frekuensi penggunaan internet. Teknologi informasi dipandang sebagai penyeimbang potensial peluang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan penindasan melalui kemampuan pendidikan, sosial, dan profesional mereka (Bastien, 2020).

Penelitian Azis dan Hasna (2020) menemukan bahwa penggunaan internet secara signifikan dapat meningkatkan partisipasi politik. Kenyataan bahwa implementasi e-demokrasi di Indonesia masih menimbulkan dilema juga harus menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya, implementasi kebebasan berdemokrasi di internet di Indonesia masih memiliki masalah karena kebebasan internet di Indonesia dikategorikan sebagian gratis. Akhirnya, untuk membuat kebijakan e-demokrasi yang proporsional, negara harus membuat kebijakan e-demokrasi yang merangkul prinsip menciptakan ruang publik baru untuk interaksi dan musyawarah politik, menyediakan saluran komunikasi multi-arah interaktif, mengintegrasikan proses e-demokrasi dalam struktur dan pengembangan konstitusi yang lebih luas, memastikan interaksi antara warga negara dan perwakilan terpilih mereka dan pemerintah adalah bermakna, memastikan ada cukup informasi online berkualitas tinggi, yang melibatkan upaya untuk merekrut suara publik seluas-luasnya ke dalam percakapan demokratis, dan mencerminkan realitas geografi dan sosial struktur di lingkungan secara online.

Polat (2005) meneliti hubungan antara antara tiga aspek Internet dan partisipasi politik. Dalam menganalisis internet sebagai sumber informasi, menjadi pendekatan untuk situasi pengetahuan yang sempurna di mana warga negara tahu semua tentang masalah kebijakan. Namun, hal ini mengasumsikan bahwa orang-orang yang tertarik untuk mendapatkan informasi tersebut harus memiliki akses dan keterampilan yang diperlukan untuk memproses informasi. Kedua, internet sebagai media komunikasi, menunjukkan bahwa internet meningkatkan kapasitas komunikasi di cara yang tidak setara dengan mendukung beberapa bentuk komunikasi lebih dari yang lain. Oleh karena itu, berbagai mode partisipasi politik terpengaruh secara asimetris dengan menggunakan internet. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih canggih dalam menyelidiki hubungan antara kapasitas komunikasi Internet dan partisipasi politik. Ketiga, dalam menganalisis potensi internet sebagai ruang publik virtual, memperluas ruang publik adalah terbatas karena distribusinya yang tidak merata, struktur yang sangat terfragmentasi dan peningkatan komersialisasi. Namun, ada banyak komunitas online yang anggotanya ikut serta dalam debat politik online. Meskipun mereka mungkin tidak

membentuk ruang publik, komunitas online ini masih beroperasi sebagai platform di mana peserta melakukan hak-hak mereka sebagai warga negara dan berpartisipasi dalam musyawarah politik online.

Dalam lingkup kampus, partisipasi politik mahasiswa secara umum tidak jauh berbeda dengan partisipasi politik warga negara lainnya. Namun, secara spesifik perbedaannya mengenai penggunaan bentuk partisipasi politik mahasiswa itu sendiri. Dibandingkan kelompok warga negara lainnya mahasiswa dipandang sebagai warga negara yang terdidik dan memiliki akses partisipasi politik yang lebih luas. Hal ini menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial politik yang sangat penting di banyak negara. Meskipun kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam pemerintahan dan berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan proses sangat bergantung pada konteks politik, sosial ekonomi, dan budaya.

Berbeda dengan zaman dahulu, saat ini mahasiswa selain masih menggunakan cara tradisional seperti demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi politik juga secara intens banyak menggunakan platform teknologi informasi seperti media sosial sebagai wahana partisipasi politik. Media sosial menumbuhkan elemen ekspresi kebebasan. Generasi muda mengungkapkan penilaian, pandangan, dan keyakinan terhadap situasi dan kondisi politik terkini.

Dengan demikian teknologi informasi memainkan peran penting dalam komunitas mana pun sebagai alat pendukung dalam proses demokrasi. Syarat untuk itu terjadi terutama adalah keinginan kuat dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara politik serta memiliki akses dan keterampilan untuk menggunakannya teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan akses dan partisipasi politik pengguna lama layanan sosial dan untuk peluang yang ditawarkannya untuk akses pengguna baru

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Partisipatisipasi politik mengacu pada sesuatu yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Jika rakyat sendiri memberikan

suara langsung pada kebijakan dan undang-undang, itu disebut demokrasi langsung. Jika mereka memilih perwakilan untuk membuat undang-undang dan kebijakan, itu disebut demokrasi perwakilan. Istilah demokrasi partisipatif mengacu pada sesuatu di antara keduanya: rakyat memilih pemimpin tetapi juga memainkan peran dalam membentuk kebijakan. Demokrasi partisipatif adalah tentang partisipasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara, bukan hanya politisi, memiliki suara nyata dalam pembuatan aturan dan program yang membentuk pemerintahan.

Eksistensi partisipasi politik kontemporer sangat terbantu dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menawarkan budaya demokrasi baru. Kemajuan teknologi informasi berpotensi mendorong warga negara berperan serta dalam wacana dan praksis politik. Teknologi informasi sangat penting dan vital dalam setiap masyarakat. Informasi telah menjadi sumber daya penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat tertentu.

5.2 Saran

Untuk penelitian lebih lanjut peranan teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara dan adanya sebuah model didalamnya untuk dapat melihat nilai pengujian dari antusias warga dalam partisipasi politik

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dalou, R., & Abu-Shanab, E. (2013, May). E-participation levels and technologies. In *The 6th International Conference on Information Technology (ICIT 2013)* (pp. 8-10).
- Anshori, S. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2(1).
- Aziz, M. S., & Hasna, S. (2020, December). The Problem of e-Democracy and its Impact on Political Participation in Indonesia. In *6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)* (pp. 470-476). Atlantis Press.

- Bastien, F., Koop, R., Small, T. A., Giasson, T., & Jansen, H. (2020). The role of online technologies and digital skills in the political participation of citizens with disabilities. *Journal of Information technology & politics*, 17(3), 218-231.
- Budiman, H. (2017). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 31-43.
- Bullock, K. (2014). Citizen Participation and Democracy. In: *Citizens, Community and Crime Control. Crime Prevention and Security Management*. Palgrave Macmillan, London.
- Fitri, Z., Zulkifli, Z., Ula, M., & Suhendra, B. (2022). Analysis of the Teacher's Role in Evaluation of Student Learning Performance Using the TOPSIS Model (Case Study of Smk Negeri 1 Lhokseumawe). *Journal Of Informatics And Telecommunication Engineering*, 5(2), 452-462.
- Fitri, Z., Akbar, M. Z., & Ula, M. (2021). Penerapan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Blended Untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa Di Smkn 3 Lhokseumawe. *JURNAL SISTEM INFORMASI*, 5(1).
- Ilmy, M. I., Rahmatunnisa, M., & Hendra, H. (2021). Upaya KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2).
- Ikram, M. F. D., Fachrurrazi, S., & Fhonna, R. P. (2021). Media Pembelajaran Interaktif Membangun Android Application For Beginners Berbasis Multimedia. *Jurnal Sistem Informasi*, 5(2).
- Lidén, Gunnar & Avdic, Anders. (2003). Democracy Functions of Information Technology.. 142. 10.1109/HICSS.2003.1174320.
- Nam, T. (2012). Dual effects of the internet on political activism: Reinforcing and mobilizing. *Government Information Quarterly*, 29, S90-S97.
- Parry, Geraint, George Moyser, and Neil Day (1992), *Political Participation and Democracy in Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Polat, R. K. (2005). The Internet and political participation: Exploring the explanatory links. *European journal of communication*, 20(4), 435-459.

- Pratama, A., Fachrurrazi, S., & Ula, M. (2021). Perancangan Dan Aplikasi Model Sistem Informasi Sekolah. *JURNAL SISTEM INFORMASI*, 5(1).
- Sanford, C., & Rose, J. (2007). Characterizing eparticipation. *International Journal of Information Management*, 27(6), 406-421.
- Saebo, O., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly*, 25(3), 400-428.
- Uhlener, C. J. (2001). Political participation. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 11078, 11082.
- Situmeang, S. M. T. (2021). MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MELALUI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI. *Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021*, 1(1), 1090-1098.
- Yusri, A., Pane, R. P., & Vadilah, N. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kelurahan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10326-10330.
- Ula, M., Pratama, A., Asbar, Y., Fuadi, W., Fajri, R., & Hardi, R. (2021, April). A New Model of The Student Attendance Monitoring System Using RFID Technology. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1807, No. 1, p. 012026). IOP Publishing.
- Van Deth, J. W. (2016). What is political participation. *The international encyclopedia of political communication*, 49(3), 349-367.